

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024**



**DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Kesehatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pematang Siantar,       Maret 2025  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**Drg.IRMA SURYANI,MKM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680113 199212 2 001

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Penjelasan Umum Organisasi
- 1.2 Aspek strategis Organisasi
- 1.3 Permasalahan Umum ( Isu Strategis)

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja
- 2.2 Indikator Kinerja Utama

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.1.1 Perbandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2024
  - 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3.1.3 Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 3.1.4 Perbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  - 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.2. Realisasi Anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

- 4.1 Perjanjian Kinerja
- 4.2 Indikator Kinerja Utama
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Penjelasan Umum Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan instansi pemerintahan yang *good governance*, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistim akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar wajib menyusun Laporan Kinerja Dinas Kesehatan yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar 2022-2027.

## **LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024

## **1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Tugas pokok dan Fungsi OPD Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan sudah di turunkan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kota Pematangsiantar yang mana susunannya pada OPD Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
  - f. UPTD dan;
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan dan Program; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan  
Mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta

sumber daya kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya

## **2. Sekretaris Dinas Kesehatan**

Merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan perkantoran, urusan rumah tangga dan barang inventaris lainnya dan mengkoordinasikan program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang.

Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan, evaluasi serta pelaporan program/kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, arsip, urusan rumah tangga dan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan aset, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pelaksanaan Koordinasi program/kegiatan yang diselenggarakan bidang-bidang lingkungan dinas;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Penjabaran tugas sebagaimana yang dimaksud dibagi kedalam sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas sebagai berikut :

- a) Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan dan Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas :
  - 1) Melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab dinas;
  - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
  - 1) Menyiapkan dan koordinasi Penyelenggaraan urusan kegiatan keuangan dan pengelolaan asset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian, dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan; dan
  - 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang Kesehatan Masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Penyiapan perumusan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**

Merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan perumusan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian tidak penyakit menular dan kesehatan jiwa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan**

Merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

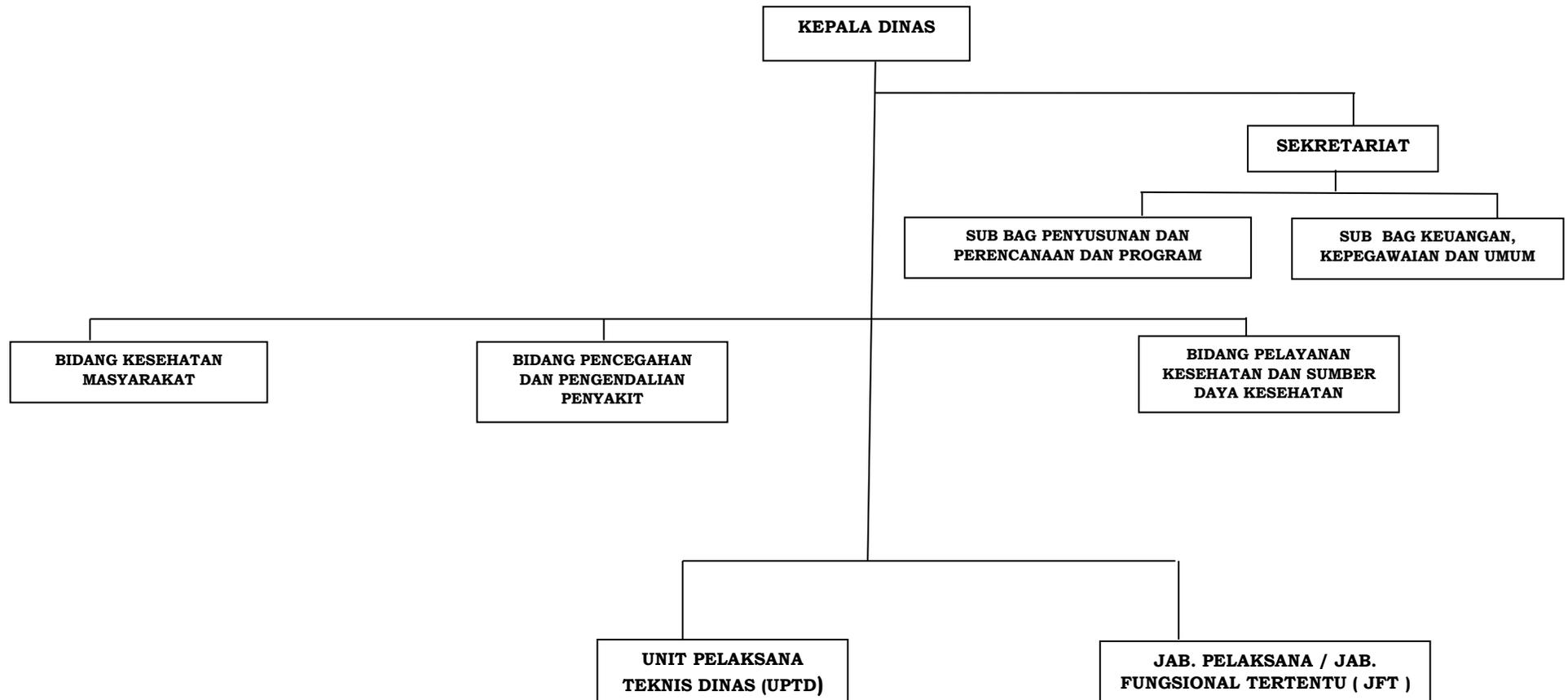
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan dan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, pengawasan obat dan makanan, alat kesehatan, sarana distribusi kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, pengawasan obat dan makanan, alat kesehatan, sarana distribusi kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pelaksanaan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, pengawasan obat dan makanan, alat kesehatan, sarana distribusi kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Penyiapan dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, pengawasan obat dan makanan, alat kesehatan, sarana distribusi kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pelaporan di bidang pelayanan primer, rujukan termasuk peningkatan mutu, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, pengawasan obat dan makanan, alat kesehatan, sarana distribusi kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

**NOMOR : 27 Tahun 2022**  
**TANGGAL : 30 Desember 2022**  
**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**



NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 061/137/XII/WK-THN 2022 TENTANG  
 PENETAPAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

**PETA JABATAN DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPALA DINAS	B	ABK	+/-
	1	1	0

SEKRETARIS	B	ABK	+/-
	1	1	0

KEPALA DINAS	B	ABK	+/-
Administrator Kesehatan Ahli Madya	7	7	0
Administraor Kesehatan Ahli Muda	7	8	-1
Administraor Kesehatan Ahli Pertama	1	10	-9
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	3	4	-1
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	4	6	-2
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	2	8	-6
Epidemilog Kesehatan Ahli Madya	3	4	-1
Epidemilog Kesehatan Ahli Muda	3	6	-3
Epidemilog Kesehatan Ahli Pertama	0	8	-8
Sanitarian Ahli Madya	2	2	0
Sanitarian Ahli Muda	1	2	-1
Sanitarian Ahli Pertama	0	3	-3
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	1	1	0
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	0	1	-1
Pembimbing kesehatan Kerja Ahli Pertama	0	1	-1
Nutrisionis Ahli Madya	0	2	-2
Nutrisionis Ahli Muda	0	2	-2
Nutrisionis Ahli Pertama	1	2	-1
Nutrisionis Penyelia	2	2	0
Nutrisionis Mahir	0	3	-3
Arsiparis Ahli Pertama	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	0	1	-1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	0	2	-2
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	2	-2
Perencana Ahli Madya	0	1	-1
Perencana Ahli Muda	0	1	-1
Perencana Ahli Pertama	0	2	-2

Kasubbag Keuangan, Kepegawaian dan Umum	B	ABK	+/-
	1	1	0

Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Perencanaan dan Program	B	ABK	+/-
	1	1	0

Jabatan Pelaksana	B	ABK	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	9	11	-2
Pengolah Data dan Informasi	2	5	-3
Pengadministrasi Perkantoran	6	8	-2
Penata Layanan Operasional	0	2	-2
Pengelola Layanan Operasional	0	2	-2
Operator Layanan Operasional	0	4	-4

Jabatan Pelaksana	B	ABK	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	2	4	-2
Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
Penata Layanan Operasional	0	1	-1
Operator Layanan Operasional	0	1	-1

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	B	ABK	+/-
	1	1	0

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	B	ABK	+/-
	1	1	0

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	B	ABK	+/-
	1	1	0

Jabatan Pelaksana	B	ABK	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	3	5	-2
Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2

Operator Operasional	Layanan	0	1	-1
----------------------	---------	---	---	----

### Data Umum Organisasi

Jumlah pegawai

Dinas Kesehatan Kota

Jabatan Pelaksana	B	ABK	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
Pengelola Operasional Layanan	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	B	ABK	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
Pengolah Data dan Informasi	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
Pengelola Operasional Layanan	0	1	-1

Pematangsiantar sebanyak 641 orang PNS, CPNS/PPPK sebanyak 13 orang dan 9 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 663 orang dengan rincian sesuai sebagai berikut :

#### a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil/THL

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil/THL Tahun 2024**

NO	JENIS PEGAWAI DINAS KESEHATAN	JUMLAH
1.	PNS	641
2.	CPNS/PPPK	13
3.	THL	9
	TOTAL	663

#### b. Kualifikasi Pendidikan PNS dan THL

**Tabel 1.2**  
**Kualifikasi Pendidikan PNS dan THL Tahun 2024**

NO	JENIS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN	JUMLAH
1.	PNS	
	1. Doktor (S3)	1
	2. Pasca Sarjana (S2)	54
	3. Sarjana (S1/D-IV)	262
	4. Sarjana Muda ( D3)	332
	5. SLTA/SPK	5
	TOTAL	654
2	THL	
	1. Doktor (S3)	-
	2. Pasca Sarjana (S2)	-
	3. Sarjana (S1/D-IV)	0
	4. Sarjana Muda ( D3)	0
	5. Diploma I	0
	6. SLTA /SMK	9
	7. SD / SLTP	0
	TOTAL	9

**c. Pangkat /Golongan**

**Tabel 1.3  
Pangkat /Golongan Tahun 2024**

NO	Pangkat Dinas Kesehatan	Golongan	Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV	e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV	d	-
3.	Pembina Utama Muda	IV	c	10
4.	Pembina Tingkat I	IV	b	23
5.	Pembina	IV	a	87
6.	Penata Tingkat I	III	d	198
7.	Penata	III	c	111
8.	Penata Muda Tingkat I	III	b	87
9.	Penata Muda	III	a	47
10.	Pengatur Tingkat I	II	d	51
11.	Pengatur	II	c	24
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	2
13.	Pengatur Muda	II	a	-
14.	Juru Tingkat I	I	d	-
15.	Juru	I	c	-
16.	Juru Muda Tingkat I	I	b	1
17.	Juru Muda	I	a	0
18.	PPPK	IX		1
19.	PPPK	VII		12
	TOTAL			TOTAL

**d. Pengisian Jabatan Sesuai Struktur Organisasi**

**Tabel 1.4  
Pengisian Jabatan Sesuai Struktur Organisasi Tahun 2024**

NO	Jabatan Struktural Dinas Kesehatan	Jumlah	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Kepala Bidang	3	3	-
4.	Kepala Sub Bagian	2	2	-
5.	Kepala UPTD Puskesmas/Instalasi Farmasi	20	20	-
6.	Kepala Tata Usaha UPTK Puskesmas	20	20	-

### 1.3. Permasalahan Umum ( Isu Strategis)

Isu- Isu strategis yang dihadapi dalam tahun 2024 antara lain:

- a.** Masih ada masyarakat yang tidak bisa didaftarkan ke JKN
- b.** Peserta JKN menunggak dikarenakan keluarga tidak mampu, kurang sosialisasi/informasi, persepsi yang salah tentang JKN, tidak patuh pada regulasi JKN
- c.** Adanya kematian ibu disebabkan perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi penyakit penyerta menular dan tidak menular
- d.** Adanya kematian bayi baru lahir dan bayi disebabkan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, kelainan bawaan, ikterus dan penyebab lainnya, penyakit penyerta (pneumonia, diare, kelainan saluran cerna, sepsis, kelainan saraf dan kelainan kongenital disebabkan penyakit menular yaitu diare, pneumonia, campak dan lainnya
- e.** Masih belum Optimalnya UKBM
- f.** Rendahnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- g.** Gaya hidup yang tidak sehat
- h.** Rendahnya Kepatuhan Terhadap KTR
- i.** Masih rendahnya deteksi dini terhadap factor resiko penyakit tidak menular
- j.** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka Kematian Bayi 4. Capaian SPM Kesehatan	98,5% 132,38/100000 Kelahiran Hidup 6,50/1000 Kelahiran Hidup 100%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5
	8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1

Sasaran Strategis I yaitu Meningkatkan Ases Mutu dan Pelayanan Kesehatan dengan Indikator kinerja :

1. Cakupan UHC 98, 5%

UHC atau cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) Dimana semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Pelayanan kesehatan dilakukan secara komprehensif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer.

### Tujuan UHC

- Menjamin setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu
- Menjamin setiap orang memiliki akses ke layanan perawatan kesehatan berkualitas tinggi tanpa menghadapi kesulitan keuangan
- Mencakup seluruh aspek pelayanan kesehatan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif

### 2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan selama kehamilan, persalinan, dan 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu negara. Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat sebagai indikator untuk mengetahui derajat kesehatan perempuan dan status kesehatan ibu di suatu wilayah

Target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2024 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Pematangsiantar target AKI sebesar 132/100.000 kelahiran hidup.

### 3. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. AKB merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

#### Manfaat AKB

- Mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat
- Mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal anak-anak
- Mencerminkan tingkat kesehatan ibu
- Mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan
- Mencerminkan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat
- Mencerminkan kemajuan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Menunjukkan fungsinya sebagai indikator ampuh dalam menilai perubahan kondisi kesehatan di suatu negara
- Mengidentifikasi populasi yang rentan

#### Rumusan AKB

AKB adalah banyaknya kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

### 4. Capaian SPM Kesehatan

NO	INDIKATOR	SASARAN
----	-----------	---------

1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.805
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.795
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.511
4	Pelayanan Kesehatan Balita	22.057
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	45.440
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	175.571
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	34.134
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	64.802
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	4.876
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	388
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.505
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	6.859

Sasaran Strategi II : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja :

1. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota dengan target 0,35  
Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.. IKS dihitung dari akumulasi nilai 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Berikut ini adalah 12 indikator yang digunakan untuk menghitung IKS:

- Keluarga mengikuti program KB
- Ibu bersalin di fasilitas kesehatan
- Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- Bayi mendapat ASI eksklusif
- Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
- Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
- Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- Keluarga sudah menjadi anggota JKN
- Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
- Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan nilai IKS, keluarga dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8

- Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8
- Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5

Sasaran Strategi III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan Target B

Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibagi menjadi 7 kategori.

Kategori penilaian SAKIP

- D untuk nilai 0-30
- C untuk nilai 30-50
- CC untuk nilai 50-60
- B untuk nilai 60-70
- BB untuk nilai 70-80
- A untuk nilai 80-90
- AA untuk nilai 90-100

SAKIP merupakan alat ukur kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Komponen penilaian SAKIP Dokumen perencanaan kinerja, Dokumen pengukuran kinerja, Dokumen pelaporan kinerja, Dokumen evaluasi internal, Dokumen capaian kinerja.

Manfaat SAKIP

- Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
- Membantu dalam penyiapan dokumen SAKIP, seperti Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Rencana Kinerja Tahunan
- Membantu dalam penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja

Sasaran Strategi III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan target 89,5

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

Tujuan IKM

- Mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala
- Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mengukur keberhasilan kinerja lembaga pelayanan publik

2. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah target 1 Inovasi yaitu ePuskesmas.

ePuskesmas adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat data pelayanan kesehatan di Puskesmas secara digital. Aplikasi ini juga merupakan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain.

Manfaat ePuskesmas di antaranya:

- Membantu manajemen Puskesmas menjadi lebih rapi dan terstruktur
- Mengurangi penggunaan kertas di Puskesmas
- Mempercepat proses pelayanan di Puskesmas
- Memudahkan pelaporan di Puskesmas
- Memudahkan koordinasi antar lembaga Dinas Kesehatan dan Puskesmas
- Mencegah kehilangan data di Puskesmas

ePuskesmas dikembangkan oleh Infokes dan menggunakan sistem cloud computing. Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain, seperti: PCare BPJS, SATUSEHAT.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

**Tabel 2.2**  
**Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA	URAIAN/ DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Cakupan Universal Health Coverage (UHC)	UHC adalah Cakupan penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau	Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar yang terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bagi total/ Jumlah Populasi Penduduk Kota Pematangsiantar di kali 100%	BPJS	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
				2	Angka Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau	Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Profil Kesehatan

					penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.			Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	
				3.	Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama X 1.000	Profil Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
		2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5.	Meningkatnya Puskesmas dengan Akreditasi Minimal Madya	upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tujuan akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat secara berkesinambungan dan bukan sekedar penilaian untuk	Jumlah Puskesmas dengan Akreditasi minimal Madya/Jumlah Puskesmas di Kota Pematangsiantar	Profil Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ME NKES/165/2024

					mendapatkan sertifikat akreditasi.			Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat	
				6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya	Hasil survei pengukuran IKM Dinas Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Publik	Profil Kesehatan	
		3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	7.	Cakupan Keluarga Sehat	Keluarga sehat, secara definisi diartikan sebagai suatu keluarga yang seluruh anggotanya sejahtera, baik secara mental maupun fisik. Sehingga mampu hidup dengan normal di tengah-tengah lingkungan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial dan telah memenuhi 12 Indikator Keluarga Sehat	Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1/ 12-Jumlah Indikator yang tidak ada di Keluarga	Profil Kesehatan	Permenkes RI No. 39/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi Wali Kota yang ke satu yaitu Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai *Local Wisdom* dan keheterogenan yang berkualitas. Berdasarkan tujuan tersebut maka dianalisis capaian kinerja pembangunan kesehatan sebagai berikut :

**3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024**

**Tabel 3.1**  
**Target dan Capaian Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2024**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC	98,5%	99,90%	101,42
	2. Angka Kematian Ibu	132,38/100000	92/100000	143,89
	3. Angka Kematian Bayi	6,50/1000	4,4/1000	147,72
	4. Capaian Kesehatan SPM	100%	100%	100
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35	0,31	88,57
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	<i>Belum ada hasil penilaian.</i>	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	91,75	102,5
	8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat, pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar menetapkan 8 indikator yang merupakan ukuran keberhasilan untuk

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Dari 8 indikator yang diukur, sebanyak 7 (Tujuh) indikator memenuhi target, sementara 1 (satu) indikator lainnya dibawah target antara lain :

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Indikator Kinerja Cakupan UHC

**Tabel 3.2.**  
**Cakupan UHC Kota Pematangsiantar dari Januari – Desember 2024**

Jumlah Penduduk	Segmen Peserta						Total Peserta Terdaftar		Ket.
	PBI JKN	PBPU & BP Pemda		Non PBI			Jumlah	%	
		Kota	Provinsi	PPU	PBPU	BP			
274.392	84.441	22.965	4.092	86.341	56.402	12.365	266.606	97,16	<b>1 Des 23</b>
274.392	83.959	26.239	4.342	86.431	56.618	12.436	270.025	98,41	<b>1 Jan 24</b>
275.190	83.407	27.157	3.930	86.468	56.528	12.250	269.740	98,02	<b>1 Feb 24</b>
275.190	83.032	28.939	3.225	86.004	56.746	12.175	270.121	98,16	<b>1 Mar 24</b>
275.190	80.912	28.638	3.880	85.664	56.950	12.226	268.270	97,49	<b>1 April 24</b>
275.190	80.679	28.187	4.282	85.864	57.642	12.121	268.775	97,67	<b>1 Mei 24</b>
275.190	80.457	28.723	3.939	86.235	58.062	12.120	269.536	97,95	<b>1 Juni 24</b>
276.933	80.058	28.770	4.039	86.658	58.366	12.067	269.958	97,48	<b>1 Juli 24</b>
276.933	79.790	34.631	1.090	87.375	58.677	12.053	273.616	98,80	<b>1 Agust 24</b>
276.933	79.392	31.861	3.936	87.499	58.957	11.956	273.601	98,80	<b>1 Sept 24</b>
278.325	79.159	31.847	3.990	87.668	59.142	11.909	273.715	98,34	<b>1 Okt 24</b>
278.325	79.021	31.256	3.990	87.873	59.070	11.690	272.900	98,05	<b>1 Nov 24</b>
278.325	78.704	35.889	4.480	88.012	59.306	11.644	278.035	99,90	<b>1 Des 24</b>

Berdasarkan tabel 3.2 yang menunjukkan cakupan Jaminan Kesehatan di Kota Pematangsiantar telah mencapai 99,90% atau sebanyak 278.035 jiwa dari total jumlah penduduk di Kota Pematangsiantar di tahun 2024 sebanyak 278.325 jiwa. Dimana target indikator kinerja Cakupan UHC sebesar 98,5% dari total jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2024. Pencapaian sebesar 101% sudah melebihi target Indikator kinerja Cakupan UHC 2024. Masih ada penduduk Kota Pematangsiantar yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan sebanyak 1,69% yaitu 290 jiwa.

## 2. Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu

Pada indikator Kinerja ini yang disampaikan adalah jumlah kematian ibu oleh akibat proses maternal seperti di uraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.  
KEMATIAN IBU BERDASARKAN UMUR

<b>NO</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>&lt; 20 tahun</b>	<b>20-34 tahun</b>	<b>≥35 tahun</b>	<b>TOTAL</b>
1	Kesatria	0	1	1	1
2	Tomuan	0	0	0	0
3	Karo	0	0	0	0
4	Martimbang	0	0	0	0
5	Aek Nauli	0	0	0	0
6	Raya	0	0	0	0
7	Kartini	0	0	0	0
8	Singosari	0	0	0	0
9	Martoba	0	0	0	0
10	Kahean	0	0	1	1
11	Bane	0	0	0	0
12	Rami	0	1	1	1
13	Gurilla	0	0	0	0
14	Bah Kapul	0	0	0	0
15	Parsoburan	0	0	0	0
16	BP Nauli	0	0	0	0
17	Pardamean	0	0	0	0
18	Bah Biak	0	0	0	0
19	Simarimbun	0	0	1	1
<b>JUMLAH</b>		0	2	2	<b>4</b>

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat kematian pada usia 20 sampai 34 tahun sebanyak 2 Kematian, pada usia  $\geq 35$  tahun sebanyak 2 kematian dari total kasus 5 kematian. Target indikator Kinerja Angka Kematian Ibu 2024 sebanyak 4 kematian. Menunjukkan kematian

dibawah target di tahun 2024. Hal ini menunjukkan akses pelayanan maternitas dan kualitas yang memadai. Namun masih dibutuhkan kerja keras oleh semua sektor agar terjadi lagi penurunan kematian ibu akibat proses maternitas.

### 3. Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi

**Tabel 3.4**  
**JUMLAH KEMATIAN BAYI**  
**(0-11 BULAN)NEONATAL (0-28 HARI)+POST NEONATAL (29 HARI - 11 BULAN )**

<b>NO.</b>	<b>PUSKESMAS</b>	<b>JUMLAH LAHIR HIDUP</b>	<b>BAYI LAHIR MATI</b>	<b>KEMATIAN BAYI</b>
1	Kesatria	371	1	0
2	Tomuan	255	2	0
3	Karo	141	1	3
4	Martimbang	72	0	0
5	Aek Nauli	65	2	0
6	Raya	178	0	2
7	Kartini	191	1	1
8	Singosari	308	1	3
9	Martoba	362	0	0
10	Kahean	391	1	0
11	Bane	117	0	1
12	Rami	850	1	5
13	Gurilla	107	0	1
14	Bah Kapul	438	0	0
15	Parsoburan	44	0	0
16	BP Nauli	104	1	1
17	Pardamean	87	0	0
18	Bah Biak	138	1	2
19	Simarimbun	146	2	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>4365</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

Berdasarkan table 3.5. jumlah kematian bayi sebanyak 22 orang. Penghitungan untuk memperoleh realisasi target sebesar 4,4/1000 Kelahiran Hidup adalah dengan cara jumlah kematian bayi sebanyak 22 kematian dibagi jumlah kelahiran hidup di Kota Pematangsiantar sehingga diperoleh angka kematian bayi sebesar 4,4/1000 Kelahiran Hidup.

Tabel 3.5. Capaian SPM Kesehatan

<b>N o</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SASARA N</b>	<b>CAPAIA N 2024</b>	<b>%</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.805	4354	90,61%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.795	4272	89,09%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.511	4328	95,94%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	22.057	20.023	90,77%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	45.440	45.440	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	175.571	170.066	96,86%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	34.134	32.668	95,76%
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	64.802	52.466	84,35%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	4.876	5168	105%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	388	396	102%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.505	11686	137%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	6.859	10.303	150,21%

Tabel 3.6. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota Pematangsiantar Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH KELUARGA TAHUN 2024</b>	<b>IKS</b>
1	SIANTAR TIMUR	9073	0,36
2	SIANTAR BARAT	8400	0,27
3	SIANTAR UTARA	11057	0,26
4	SIANTAR SELATAN	3592	0,34
5	SIANTAR MARIHAT	4123	0,26
6	SIANTAR MARTOBA	9985	0,40
7	SIANTAR SITALASARI	5259	0,31
8	SIANTAR MARIMBUN	4249	0,28
Kota Pematangsiantar		55738	0,31

INDIKATOR KELUARGA SEHAT :

- Nilai indeks > 0,8 : Keluarga Sehat
- Nilai indeks 0,5 - 0,8 : Keluarga pra sehat
- Nilai Indeks < 0,5 : Keluarga tidak sehat



Menurut Kemenkes, ada 12 Indikator Keluarga Sehat, yang menjadi bahan survei untuk memperoleh data keluarga sehat yaitu **Keluarga mengikuti program KB, Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, Bayi mendapat ASI eksklusif, Balita mendapat pemantauan pertumbuhan, Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih, Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Apabila keluarga memenuhi indikator tersebut maka dikatakan keluarga itu keluarga sehat demikian sebaliknya. Target indikator kinerja ini 0,34 maka realisasi 0,31 belum mencapai target, namun nilai ini masih jauh dari nilai indeks keluarga sehat yaitu >8. Sehingga masih dibutuhkan kerjasama lintas program dan lintas program untuk meningkatkan jumlah keluarga sehat**

Tabel 3.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

**NILAI UNSUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024**

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan	3,68
2	Prosedur	3.64
3	Waktu Pelayanan	3.68
4	Biaya/tarif	3.93
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.66
6	Kompetensi Pelaksana	3.68
7	Perilaku Pelaksana	3.68
8	Kualitas Sarana Prasarana	3.66
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.93

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:  
 $(3.68 \times 0,41) + (3.64 \times 0,40) + (3.68 \times 0,41) + (3.93 \times 0,44) + (3.66 \times 0,41) + (3.68 \times 0,41) + (3.68 \times 0,41) + (3.66 \times 0,41) + (3,93 \times 0,44) = \text{Nilai Indeks (X)}$  adalah 3,73

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar =  $3,73 \times 25 = 93,25$
- b) Mutu pelayanan = A
- c) Kinerja unit pelayanan = Sangat Baik

### 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
Cakupan UHC	95%	98,31%	103,48%	98,5%	99,9%	101.42%
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	88,8	111%	89,5	91,75	102,5%
Angka Kematian Ibu	6	5	120%	132/100.000 Kelahiran Hidup	94,2/100.000 Kelahiran Hidup	143,89%
Angka Kematian Bayi	5,26/ 1000 KH	6,88/ 1000 KH	76,45%	6,5/1000 Kelahiran Hidup	4,4/1000 Kelahiran Hidup	147,72%
Meningkatnya Puskesmas dengan akreditasi minimal Madya	80%	100%	125%			
Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,25	0,26	104%	0.35	0.31	88,57%
Capaian SPM Kesehatan				100%	100%	100%
Nilai AKIP Perangkat Daerah				B	Belun selesai penilaian	0
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah				1	1	100%

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISAS I 2024	TARG ET 2025	TARG ET 2026	TARG ET 2027
1	1. Cakupan UHC	95%	98,31%	98%	98%	98%
	2. Angka Kematian Ibu	132,38/100.000 Kelahiran Hidup	94,2/100.000 Kelahiran Hidup	130/100.000 Kelahiran Hidup	128/100.000 Kelahiran Hidup	127/100.000 Kelahiran Hidup
	3. Angka Kematian Bayi	6,50/1000 Kelahiran Hidup	4,4/1000 Kelahiran Hidup	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH
	4. Capaian SPM Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
2	5.Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35	0,314	75	75	77
3	6.Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	Belum ada nilai	B	B	B
4	7.Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	91,75	90	95	100
	8.Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	Belum ditetapkan		

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas untuk Cakupan Indeks Keluarga sehat, target 2024 pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Angka Kematian Bayi dinaikkan lebih tinggi dari target 2024-2026 yang akan dilanjutkan dengan revisi Renstra Dinas Kesehatan. Khusus untuk Meningkatkan Puskesmas dengan akreditasi minimal Madya dan Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota, karena indikator kinerja ini baru muncul di perubahan IKU dan PK Tahun 2024, maka target untuk 2024, 2025 dan 2026 belum ditetapkan. Untuk itu target-target di atas secara keseluruhan perlu ditinjau ulang dan dimuat dalam revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027

### 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Standar Nasional

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini**  
**Dengan Standar Nasional**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	Target Nasional
1	Cakupan UHC	95%	98,31%	98%
2	Angka Kematian Ibu	132,38/100.000 Kelahiran Hidup	94,2/100.000 Kelahiran Hidup	68,19/100.000 pddk
3	Angka Kematian Bayi	6,50/1000 Kelahiran Hidup	4,4/1000 Kelahiran Hidup	3,4/ 1.000 KH
4	Capaian SPM Kesehatan	100%	100%	100%
5	Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35	0,314	0,8
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	Tidak ditentukan.
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	91,75	>80
8	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	Tidak ditentukan.

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas menunjukkan ada 3 indikator kinerja yang masih dibawah Target Nasional yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Cakupan Indeks Keluarga Sehat.

### 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.11

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Solusi yang Telah dilakukan
1	Cakupan UHC	95%	98,31%	Komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam optimalisasi pelaksanaan Program JKN diantaranya dalam ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar		Penambahan anggaran belanja iuran dan bantuan iuran JKN pada P-APBD 2024
2	Angka Kematian Ibu	132,38/100.000 Kelahiran Hidup	94,2/100.000 Kelahiran Hidup	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC) dan Ibu Bersalin dilakukan sesuai standar. 2. Tersedianya sarana dan	1. Pengadaan USG 2. Audit Maternal Perinatal Pelatihan pelayanan ANC dan Persalinan	

				<p>prasarana faskes/faskes rujukan persalinan yang memadai</p> <p>Kapasitas nakes sesuai standar</p>	<p>bagi dokter dan bidan</p>	
3	<p>Angka Kematian Bayi</p>	<p>6,50/1000 Kelahiran Hidup</p>	<p>4,4/1000 Kelahiran Hidup</p>	<p>1. Masih belum Terselenggara ya pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai standar.</p> <p>2. Belum Tersedianya sarana dan prasarana faskes/faskes rujukan untuk bayi baru lahir sesuai standar. Kapasitas nakes Belum sesuai standar</p>	<p>1. Pengadaan Alkes NICU pada RSUD</p> <p>2. Audit Maternal Perinatal Pelatihan pelayanan ANC dan Persalinan bagi dokter dan bidan</p>	
4	<p>Capaian SPM Kesehatan</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Terdapat 5 indikator dari 12 Indikator SPM Kesehatan yang tercapai bahkan melebihi 100% sehingga total</p>	<p>7 Indikator yang belum mencapai target diakibatkan sasaran dari Pusdatin terlalu tinggi sehingga sulit mencapai</p>	

				pencapaian SPM secara keseluruhan mencapai 100%	sasaran yang sudah ditentukan.	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	91,75	Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai SOP yang ditetapkan dan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009		Dilakukan pembinaan dan Monev peningkatan mutu Puskesmas oleh Dinkes. Dilakukan Monev Aplikasi Indikator Mutu (INM)
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	B	Melakukan Penyusunan Laporan sesuai ketentuan yang berlaku		
7	Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35	0,314		Masih banyaknya keluarga yang anggota keluarganya merokok. Dimana apabila 1 indikator saja tidak terpenuhi, maka status keluarga tersebut menjadi keluarga tidak sehat.	Dilakukan Pembinaan dan Monev Program Keluarga Sehat oleh Dinkes

8	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	Tersedianya Inovasi Daerah Berupa Aplikasi ePuskesmas dan tersedianya anggaran di puskesmas untuk membayarkan iuran pemakaian ePuskesmas.		
---	---------------------------------	---	---	---	--	--

### 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data yang disajikan diawali dengan Matriks Tabel Realisasi program per indikator kinerja yang akan memperoleh persentase capaian realisasi anggaran tahun 2024. Yang kemudian dengan tabel perbandingan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran sehingga dapat diperoleh data efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan pada tabel 3.14. seperti berikut :

Tabel 3.12 Tabel Realisasi Program per Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1	2	4	5	6	8	9
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC 2. Angka Kematian Ibu 3. Angka kematian Bayi 4. Capaian SPM Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.715.693.976	39.819.296.643	83,45
			1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.575.684.933	17070445543	79,12
			2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.434.514.449	7.693.547.400	73,73
			3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	71.013.070	56.350.000	79,35
			4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten /Kota	68.937.924	21.492.400	31,18
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	694.341.744	405.396.622	58,39
			1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	143.542.606	51.155.170	35,64
			2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	550.799.138	354.240.452	64,31
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	426.199.643	221.358.650	51,94
			Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.111.795	32.090.250	40,06
	Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan Kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.998.102	0	0,00		

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1	2	4	5	6	8	9
			Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah tangga	113.116.000	82.890.000	73,28
			Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48.393.653	7.789.400	16,10
			Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	10.095.093	0	0,00
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga	164.485.000	98.589.000	59,94
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	412.510.756	335.797.085	81,40
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	194.285.076	189.483.136	97,53
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.800.000	17.256.500	29,86
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.425.680	129.057.449	80,45
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1552223000	14.977.461.300	96,30
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	13.320.600	0	0,00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan	198.072.356	171.000.000	86

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran
1	2	4	5	6	8	9
		Capaian AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	97.929.872.834	94.613.499.286	96,61
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.249.850	64.004.000	38,04
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.957.782.487	91.205.418.406	97,07
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.575.800	0	0,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.296.659	616.368.646	70,90
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.108.000	83.430.000	99,19
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.338.266.698	2.296.142.349	98,20
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.593.340	349.135.885	69,19

Tabel 3.13. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	2						
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC	98,5%	99,90%	101,42	15.552.223.000	14.977.461.300	96,30
	2. Angka Kematian Ibu	132,38/100000 Kelahiran Hidup	92/100000 Kelahiran Hidup	143,89	48.410.035.720	40.224.693.265	83,09
	3. Angka Kematian Bayi	6,50/1000 Kelahiran Hidup	4,4/1000 Kelahiran Hidup	147,72			
	4. Capaian Kesehatan SPM	100%	100%	100			
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	0,35	0,31	88,57	13.320.600	0	0,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	Belum ada hasil penilaian	0	97.929.872.834	94.613.499.286	96,61
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	91,75	102,5			
	8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100	198.072.356	171.000.000	86

Tabel 3.14. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Capaian KINERJA (%)</b>	<b>Capaian ANGGARAN (%)</b>	<b>Efisiensi</b>
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan UHC	101,42	96,30	1,05
	2. Angka Kematian Ibu	143,89	83,09	1,57
	3. Angka Kematian Bayi	147,72		
	4. Capaian SPM Kesehatan	100		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	5. Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	88,57	0	0
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	96,61	0
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7. Indeks Kepuasan Masyarakat	102,5	0	0
	8. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	100	86	1,16
Efisiensi Dinas Kesehatan		87,17	60,33	1,44

Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan serta 29 sub kegiatan, secara keseluruhan realisasi program/kegiatan dapat menghasilkan realisasi kinerja dengan capaian 107,01 % dengan rata dengan realisasi keuangan sebesar 95,08 %. Pada dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Berdasarkan capaian tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi, dimana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $\geq 1$ ), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu ( $<1$ ), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2024 adalah :

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar terhadap capaian realisasi anggaran sebesar  $< 1$ , artinya tidak tercapainya efisiensi penggunaan anggaran.

Sasaran pertama ” Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”

Sasaran ini didukung oleh indikator kinerja Cakupan UHC, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Pencapaian SPM Kesehatan. Dari 4 indikator yang mendukung semuanya sudah mencapai target dan dalam pencapaiannya sudah efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia dengan nilai efisiensi 1,57.

Sasaran kedua “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Dimana indikator kinerja yang di butuhkan untuk mencapainya adalah Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota dengan target 0,35 sedangkan Target nasional  $>0,8$ . Pencapaian indikator kinerja ini sebesar 88,57%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya keluarga yang belum memenuhi indikator sehat. Karena apabila 1 indikator saja tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut sudah dikategorikan Keluarga tidak sehat Adapun yang sudah dilakukan untuk mencapai antara lain :

1. Pendataan Keluarga Sehat yang dilakukan petugas Puskesmas serta dukungan dari kelurahan dan kader.
2. Dilakukan Pembinaan dan Monev Program Keluarga Sehat oleh Dinkes

Sasaran ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Pada sasaran ini dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai B dan pencapaian 100% dengan efisiensi sumber daya 1, 03

Sasaran keempat "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

Dengan 2 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Daerah. Dimana nilai efiseinsi dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat dinilai karena pada indikator ini, tidak ada anggaran dalam pelaksanaannya. Sedangkan indikator Inovasi daerah memiliki nilai 1,16

Dari keseluruhan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran diperoleh Tingkat Efisien Dinas Kesehatan dengan cara :

1. Capaian Kinerja

$$\frac{101,42+143,89+147,72+100+88,57+0+102,5+100}{9} = 87,17$$

2. Capaian Anggaran

$$\frac{96,30+83,09+96,61+0+0+86}{6} = 60,33$$

Maka Tingkat Efisien Dinas Kesehatan :

$$\frac{87,17}{60,33} = 1,44$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapat hasil Tingkat Efisien sebesar >1,44 sehingga disimpulkan bahwa Tingkat Efisiensi Dinas Kesehatan sudah tercapai.

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut analisis Program/Kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar :

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Keberhasilan
1. Cakupan UHC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	<p>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana usg diseluruh puskesmas dan alat antropometri di 248 posyandu</p> <p>2. Peningkatan kapasitas nakes (pelatihan usg) dan bumil sehat dan peningkatan kapasitas kader melalui bimtek kader posyandu</p> <p>3. Pendampingan Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas</p> <p>4. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal</p> <p>5. Pemberian PMT pada ibu hamil, kelas ibu hamil dan pemberian tablet fe</p> <p>6. Skrining Faktor Resiko Kegawatdaruratan Kehamilan</p> <p>7. Keberhasilan SPM 9-12 adalah karena aktifnya petugas pengelola program menskrining pasien yang datang berobat dan adanya kolaborasi dengan Yayasan Mentari Meraki Asih (YMM) khusus TB Paru dan kerjasama dengan RS dan Klinik untuk pasien TB Paru dan HIV.</p> <p>8. Promosi kesehatan terakait program sehingga pelayanan SPM Kesehatan dapat tercapai sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan pelayanan kesehatan secara teratur</p> <p>9. Kasus gigitan Hewan penular Rabies juga berhasil karena pengelola program yang sigap untuk penganan kasus Rabies</p> <p>Kasus penyakit menular lainnya seperti DBD keberhasilannya adanya kolaborasi dan koordinasi failitas kesehatan seperti RS dan pemerintah serta masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kasus DBD dapat ditangani</p>
2. Angka Kematian Ibu	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
3. Angka kematian Bayi	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4. Capaian SPM Kesehatan	2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	
	4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten /Kota	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	
	2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
	Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan Kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
	Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai zin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah tangga	
	Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1. Cakupan UHC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk Pembayaran

Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Keberhasilan
	MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Premi BPJS Sehingga Masyarakat mendapatkan Jaminan Kesehatan berkualitas
Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	<p>Puskesmas melakukan intervensi keluarga yang bermasalah / indikator bermasalah berdasarkan data sasaran PIS-PK.</p> <p>2. Puskesmas melakukan penginputan dan atau perubahan data intervensi keluarga ke dalam Aplikasi Keluarga Sehat.</p> <p>3. Puskesmas melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penginputan dan atau perubahan data sasaran PIS-PK.</p> <p>4. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi dan monitoring data cakupan Indeks Keluarga Sehat ditingkat Puskesmas dan Kecamatan.</p>
Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT/Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan	
Capaian AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

### 3.2. Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
1		<b>Cakupan UHC,Angka Kematian Ibu,Angka kematian Bayi,Capaian SPM</b>				
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN dan UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Capaian SPM Kesehatan</b>	<b>47.715.693.976</b>	<b>39.819.296.643</b>	7.896.397.333	83
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana,prasarana dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan jejaringnya yang sesuai standar</b>	<b>10.434.514.449</b>	<b>7.693.547.400</b>	2.740.967.049	74
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	89.998.580	67.915.484	22.083.096	75
	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6.022.966.800	5.247.630.000	775.336.800	87
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikalibrasi	39.944.000	38.263.000	1.681.000	96
2	Pengadaan Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,Makanan dan	<b>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,</b>	4.093.514.149	2.173.205.316	1.920.308.833	53

	Minuman di Fasilitas kesehatan	Vaksin, Makanan/Minuman yang Disediakan				
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga	13.320.600	-	13.320.600	0
4	Distribusi Alat Kesehatan ,Obat,Vaksin,BMHP,Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	174.770.320	166.533.600	8.236.720	95
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase capaian SPM Kesehatan</b>	<b>37.141.228.533</b>	<b>32.047.906.843</b>	5.093.321.690	86
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600.672.884	545.789.263	54.883.621	91
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118.385.194	85.774.533	32.610.661	72
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.500.000	1.500.000	-	100
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251.449.940	194.823.750	56.626.190	77

Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506.826.668	435.027.513	71.799.155	86
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26.370.218	14.915.250	11.454.968	57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.425.000	1.425.000	-	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.425.000	-	1.425.000	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.425.000	-	1.425.000	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.425.000	-	1.425.000	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.242.805.700	1.194.008.839	48.796.861	96
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan risiko terinfeksi HIV	319.819.650	270.961.952	48.857.698	85

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	85.040.770	57.287.160	27.753.610	67
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	-	-	#DIV/0!
Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.762.594.154	2.468.323.790	1.294.270.364	66
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.799.300	10.515.000	1.284.300	89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	872.700.523	452.647.153	420.053.370	52
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	107.475.621	94.227.070	13.248.551	88
Pengelolaan Pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandir, i dan tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3.600.000	-	3.600.000	0
Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	616.230.596	434.019.460	182.211.136	70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	9.861.914	-	9.861.914	0

	Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22.737.511	13.491.000	9.246.511	59
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.239.311.468	1.800.584.760	438.726.708	80
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.552.223.000	14.977.461.300	574.761.700	96
	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	30.000.000	3.000.000	27.000.000	10
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	25.101.300	24.511.900	589.400	98
	Pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan hasil pelaksanaan rekom akreditasi	45.900.000	42.120.000	3.780.000	92
	Investigasi awal kajian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	76.807.336	50.175.000	26.632.336	65
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	152.850.000	133.872.000	18.978.000	88

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	449.995.898	392.902.000	57.093.898	87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	176.521.335	145.520.000	31.001.335	82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65.310.900	49.580.450	15.730.450	76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Jumlah Penderita Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46.875.000	46.080.000	795.000	98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	331.259.152	304.115.112	27.144.040	92
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.678.469.248	1.553.481.285	124.987.963	93
Operasional Puskesmas	Terlaksana Pelayanan Puskesmas	7.687.112.753	6.243.766.303	1.443.346.450	81
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	17.920.500	6.000.000	11.920.500	33
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>Jumlah fasyankes dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan</b>	<b>71.013.070</b>	<b>56.350.000</b>	14.663.070	79
Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	71.013.070	56.350.000	14.663.070	79

	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah fasyankes dalam melaksanakan pengelolaan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan</b>	68.937.924	<b>21.492.400</b>	47.445.524	31
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18.199.700	11.025.000	7.174.700	61
	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	50.738.224	10.467.400	40.270.824	21
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase tenaga Kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan</b>	<b>694.341.744</b>	<b>405.396.622</b>	288.945.122	58
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasyankes yang melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM</b>	<b>143.542.606</b>	<b>51.155.170</b>	92.387.436	36
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	49.991.321	37.180.250	12.811.071	74

	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	93.551.285	13.974.920	79.576.365	15
	<b>Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan</b>	<b>550.799.138</b>	<b>354.241.452</b>	196.557.686	64
	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	550.799.138	354.241.452	196.557.686	64
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Produk Pangan PIRT yang tersertifikasi (SPP-IRT)</b>	<b>426.199.643</b>	<b>221.358.650</b>	204.840.993	52
	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Jumlah izin yang diberikan di Kecamatan</b>	<b>80.111.795</b>	<b>32.090.250</b>	48.021.545	40
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.111.795	32.090.250	48.021.545	40
	<b>Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan Kelas I tertentu dan</b>	<b>Jumlah sertifikat yang diberikan di wilayah Kecamatan</b>	<b>9.998.102</b>	-	9.998.102	0

	<b>perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>					
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I tertentu perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.998.102	-	9.998.102	0
	<b>Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah tangga</b>	<b>Jumlah sertifikat yang diberikan di wilayah kecamatan</b>	<b>113.116.000</b>	<b>82.890.000</b>	30.226.000	73
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	113.116.000	82.890.000	30.226.000	73

	<b>Penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>Jumlah sertifikat yang diberikan di wilayah kecamatan</b>	<b>48.393.653</b>	<b>7.789.400</b>	40.604.253	16
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan penerbitan sertifikat Laik higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga,rumah makan/restoran dan Depot Air Minum	48.393.653	7.789.400	40.604.253	16
	<b>Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</b>	<b>Jumlah stiker yang ditempelkan di wilayah Kecamatan</b>	<b>10.095.093</b>	-	10.095.093	0
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.095.093	-	10.095.093	0
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produksi minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh wilayah Kecamatan</b>	<b>164.485.000</b>	<b>98.589.000</b>	65.896.000	60

	Pemeriksaan Post Market pada produksi makanan minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	164.485.000	98.589.000	65.896.000	60
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Capaian PHBS Tingkat Kota &amp; Persentase posyandu dengan strata mandiri</b>	<b>412.510.756</b>	<b>335.797.085</b>	76.713.671	81
	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah MOU yang di Tandatangani</b>	<b>194.285.076</b>	189.483.136	4.801.940	98
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	194.285.076	189.483.136	4.801.940	98
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Capaian PHBS</b>	<b>57.800.000</b>	17.256.500	40.543.500	30
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	57.800.000	17.256.500	40.543.500	30
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</b>	<b>Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan UKBM</b>	<b>160.425.680</b>	<b>129.057.449</b>	31.368.231	80

<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	160.425.680	129.057.449	31.368.231		80
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>97.929.872.834</b>	<b>94.613.499.286</b>	3.316.373.548		97
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>168.249.850</b>	64.004.000	104.245.850		38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.268.200	-	18.268.200		0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.229.760	7.964.000	21.265.760		27
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.061.440	3.600.000	28.461.440		11
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	22.810.580	16.170.000	6.640.580		71
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	28.541.720	5.000.000	23.541.720		18

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.338.150	31.270.000	6.068.150	84
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>93.957.782.487</b>	<b>91.205.418.406</b>	2.752.364.081	97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93.951.797.027	91.205.418.406	2.746.378.621	97
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.985.460	-	5.985.460	0
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.575.800</b>	-	7.575.800	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.575.800	-	7.575.800	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>869.296.659</b>	<b>616.368.646</b>	252.928.013	71
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	84.956.835	84.257.500	699.335	99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	138.760.640	95.964.600	42.796.040	69

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	61.848.459	53.207.000	8.641.459	86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	178.530.345	81.232.830	97.297.515	46
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11.521.280	10.752.000	769.280	93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.679.100	290.954.716	102.724.384	74
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>84.108.000</b>	<b>82.430.000</b>	1.678.000	98
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	84.108.000	82.430.000	1.678.000	98
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.338.266.698</b>	<b>2.296.142.349</b>	42.124.349	98
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	-	4.950.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.046.420.698	1.006.688.349	39.732.349	96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.286.896.000	1.289.454.000	(2.558.000)	100

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>504.593.340</b>	<b>349.135.885</b>	155.457.455	69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	363.593.340	270.786.900	92.806.440	74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141.000.000	78.348.985	62.651.015	56
			147.178.618.953	<b>135.395.348.286</b>	11.783.270.667	92

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar sebesar Rp **135.395.348.286** atau dengan nilai persentase realisasi keuangan sebesar 92%.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

1. Komitmen Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam optimalisasi pelaksanaan Program JKN diantaranya dalam ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC) dan Ibu Bersalin dilakukan sesuai standar.
3. Tersedianya sarana dan prasarana faskes/faskes rujukan persalinan yang memadai
4. Kapasitas tenaga kesehatan sesuai standar
5. Meningkatkan kompetensi petugas puskesmas terkait dengan peningkatan mutu pelayanan melalui workshop terkait dengan Mutu pelayanan
6. Pendataan Keluarga Sehat yang dilakukan petugas Puskesmas serta dukungan dari kelurahan dan kader

#### **B. Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja**

1. Masih belum Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai standar.
2. Belum Tersedianya sarana dan prasarana faskes/faskes rujukan untuk bayi baru lahir sesuai standar.
3. Belum Terselenggaranya Kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemandirian Kesehatan.
4. Rendahnya kepatuhan Masyarakat atas peraturan dan himbauan di Lokasi dilarang Merokok.

#### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

1. Penambahan anggaran belanja iuran dan bantuan iuran JKN pada P-APBD 2024
2. Dilakukan pembinaan dan Monev peningkatan mutu Puskesmas oleh Dinkes. Dilakukan Monev Aplikasi Indikator Mutu (INM)
3. Pengadaan USG
4. Audit Maternal Perinatal
5. Pelatihan pelayanan ANC dan Persalinan bagi dokter dan bidan
6. Audit Maternal Perinatal
7. Dilakukan Pembinaan dan Monev Program Keluarga Sehat oleh Dinkes

D. Langkah-langkah untuk menunjang Kinerja Dinas Kesehatan dimasa mendatang antara lain:

1. Sinergitas dalam melaksanakan kegiatan dan pengelola program antar bidang baik di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
2. Peningkatan kompetensi ASN pada Dinas Kesehatan melalui Bimtek/Pelatihan.
3. Perlunya komitmen pemenuhan dokumen sebagai data/informasi untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada perangkat daerah.
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi rencana kerja bidang Kesehatan yang telah di susun.
5. Dilakukan Pembinaan dan Monev Program Keluarga Sehat oleh Dinkes

Pematang Siantar,       Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PEMATANG SIANTAR**



**Drg.IRMA SURYANI,MKM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680113 199212 2 001